

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

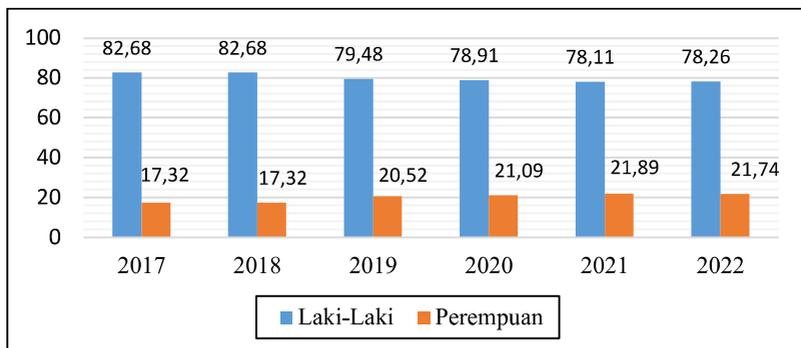
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Negara demokrasi memiliki ciri melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik, yang mana aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik (Fatiha et al., 2022). Partisipasi politik mencakup keterlibatan emosional dan kognitif individu dalam urusan politik, seperti pengetahuan politik, minat, sikap, dan opini mereka. Ini mencakup tindakan aktif warga untuk mempengaruhi keputusan publik, seperti melalui pemilihan, demonstrasi, atau keanggotaan dalam organisasi politik (Nguyen et al., 2021).

Suatu kebutuhan esensial dalam hal demokrasi, partisipasi politik, dan pemilu, yaitu pentingnya keterlibatan rakyat dalam urusan politik (Dessie, 2021). Partisipasi politik dalam konteks demokrasi di Indonesia, merujuk pada aktivitas individu sebagai warganegara yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Priandi & Roisah, 2019). Oleh karena itu, partisipasi politik dari semua segmen masyarakat termasuk perempuan sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif.

Partisipasi politik bagi perempuan merupakan keterlibatan perempuan untuk memahami, mengerti, menyadari, mengkaji, melobi, memberikan masukan hingga memprotes suatu kebijakan (Orisadare, 2019). Partisipasi politik perempuan menjadi cerminan adanya keadilan dalam demokrasi yang sedang berjalan sehingga mewujudkan hak perempuan yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi tujuan ke-5 *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Kementerian PPN, 2020). Manfaat signifikan dari partisipasi politik perempuan yaitu menguatkan pemberdayaan dalam masyarakat, mempromosikan kesetaraan gender, memperkuat representasi yang lebih adil dalam pengambilan keputusan politik, dan menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hal ini tidak hanya membantu mengatasi stereotip dan hambatan yang menghalangi perempuan mencapai potensi penuh mereka, tetapi juga memajukan

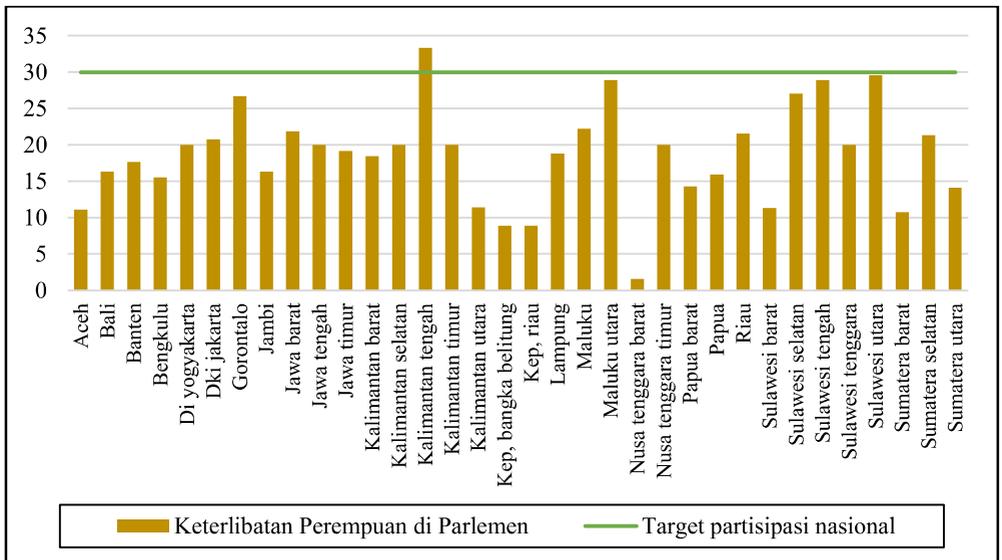
transformasi sosial menuju kesetaraan gender yang lebih inklusif (Daily, 2019). Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik dapat mengurangi ketidakesetaraan terhadap perempuan dalam kesempatan ekonomi (Kim, 2022). Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam politik dapat mendorong pembangunan sosial dan perempuan dianggap setara dengan pria dalam konteks politik (Lotwel et al., 2022). Namun, kendati jumlah perempuan secara demografis tidak jauh berbeda dengan jumlah laki-laki, terdapat tantangan yang berkaitan dengan peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan dalam arus politik yang dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah (BPS, 2023a).

*Data Inter Parliamentary Union* menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen berada pada peringkat keenam di Asean (Inter-Parliamentary Union, 2023). Gambar 1.1 menunjukkan adanya ketimpangan antara keterlibatan perempuan dan laki-laki di parlemen yang dilihat dari persentase keterlibatan laki-laki per tahun lebih unggul dibandingkan persentase keterlibatan perempuan. Walaupun persentase keterlibatan perempuan di parlemen atau badan legislatif dari tahun 2017 – 2021 menunjukkan adanya peningkatan, angka ini masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu 30%. Selain itu, persentase keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan dari 21,89% tahun 2021 menjadi 21,74% pada tahun 2022 (BPS, 2023a).



**Gambar 1. 1.** Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan di parlemen tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda. Satu-satunya provinsi yang memenuhi target partisipasi nasional dan menjadi partisipasi perempuan dalam parlemen tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase sebesar 33.33%. Kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 29.55%. Sedangkan provinsi dengan keterlibatan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1.59%. Angka ini sangat jauh dibandingkan provinsi-provinsi lain. Hal ini menjadi alasan mengapa keterlibatan perempuan di parlemen perlu diperhatikan oleh pemerintah.



**Gambar 1. 2.** Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Berdasarkan Provinsi

Belum tercapainya keterwakilan 30% keterwakilan perempuan ini tentu disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti budaya patriarki, sistem politik dan rekrutmen partai, serta media massa. Kendala finansial juga menjadi hambatan, di mana perempuan seringkali lemah secara

finansial dalam kompetisi politik yang berbiaya tinggi (Ngwu et al., 2022).

Penelitian dari Mlambo & Kapingura (2019) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan (studi kasus di Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC)) menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan, fungsi pemerintah, budaya politik, partisipasi politik secara keseluruhan memiliki hubungan positif dengan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Kemudian, Joy et al. (2021) meneliti faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik di Negara Bagian Enugu, didapatkan bahwa kemiskinan atau kurangnya pendapatan, rendahnya pendidikan, kurangnya dukungan antar sesama perempuan, dan lingkungan politik yang tidak menguntungkan menjadi faktor penghambat partisipasi perempuan dalam dunia politik. Studi dari Rita & Kopoka (2019) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan partai politik di Uganda menyebutkan bahwa kebijakan, budaya kelembagaan, serta sumber daya yang ada menjadi faktor pengaruh partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu, level pendidikan berperan besar dalam mempengaruhi Perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Owoeye (2023) meneliti tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Negara Bagian Kogi, Nigeria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan menggunakan regresi linear berganda didapatkan bahwa faktor sosial-ekonomi seperti usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, agama, keyakinan tradisional, dan pekerjaan secara signifikan memengaruhi partisipasi politik perempuan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memodelkan keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen guna untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah perempuan yang bergabung di parlemen di tahun 2022. Jumlah keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen di berbagai provinsi disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dilakukan penyelesaian merata. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan aspek wilayah pada

setiap provinsi di Indonesia. Salah satu metode statistika yang berkaitan dengan aspek wilayah adalah analisis regresi spasial. Regresi spasial merupakan pengembangan dari model regresi linear klasik. Pengembangan itu berdasarkan adanya pengaruh wilayah atau efek spasial pada data yang dianalisis (Anselin, 1988). Analisis regresi spasial dibagi menjadi dua yaitu spasial area dan spasial titik.

Salah satu metode regresi spasial titik adalah *Geographically Weighted Regression* (GWR). GWR merupakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial adalah kondisi apabila satu variabel independen yang sama memberikan pengaruh yang tidak sama pada lokasi yang berbeda dalam satu wilayah penelitian. Model GWR menghasilkan penaksir parameter yang bersifat local untuk setiap titik atau lokasi dimana data tersebut diamati. Dalam model GWR, variabel dependen  $y$  ditaksir dengan variabel independen yang masing-masing koefisien regresinya bergantung pada lokasi dimana data tersebut diamati (Fotheringham et al., 2002). GWR pernah diterapkan oleh Hapsery & Trishnanti (2021) untuk pemetaan faktor yang mempengaruhi indeks aktivitas literasi membaca di Indonesia dengan menggunakan fungsi kernel sebagai pembobot matriks GWR. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi kernel yang terbaik dalam memodelkan faktor yang mempengaruhi indeks aktivitas literasi membaca adalah *fixed bisquare* yang dilihat dari nilai  $CV$  paling minimum. Kemudian, penelitian dari Bele et al. (2022) juga menggunakan fungsi kernel dalam pemodelan kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 menggunakan *Geographically Weighted Regression* (GWR), dimana kernel terbaik adalah *adaptive kernel bisquare* yang didapatkan dari nilai  $AIC$  paling minimum dan  $R^2$  paling maksimum. Jadi, dengan metode yang sama fungsi kernel optimal yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung dari karakteristik data atau studi kasus yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan *Geographically Weighted Regression* (GWR) dengan pembobot matriks yaitu fungsi kernel (*fixed* dan *adaptive*). Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan dalam parlemen tiap provinsi di Indonesia, sehingga mempermudah pihak

pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan partipasi perempuan dalam parlemen di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana karakteristik dari keterlibatan perempuan dalam parlemen berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2022?
- b. Bagaimana pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan Indonesia dalam parlemen di tiap provinsi tahun 2022 menggunakan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan karakteristik dari keterlibatan perempuan dalam parlemen berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2022
2. memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan Indonesia dalam parlemen di tiap provinsi tahun 2022 menggunakan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Mahasiswa**

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu sebagai salah satu bentuk pembelajaran, khususnya dalam bidang statistika mengenai penerapan metode *Geographically Weighted Regression* (GWR) dalam pemodelan keterlibatan perempuan dalam dunia parlemen.

### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman terkait pengaplikasian teori secara empiris yang sejalan dengan disiplin ilmu peneliti serta menambah wawasan bagi peneliti mengenai pemetaan keterlibatan Perempuan di parlemen.

### **3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan pada bagian kepastakaan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

### **4. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat suatu prediksi, antisipasi, dan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Indonesia di parlemen.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pembobot model GWR yang digunakan adalah fungsi pembobot kernel (*fixed* dan *adaptive*) kemudian dipilih yang menghasilkan AIC paling minimum dan  $R^2$  paling maksimum.